

**ANALISIS PENGARUH INFLASI, UPAH MINIMUM REGIONAL, PDRB,
DAN NILAI TUKAR TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA
PADA PERIODE 2003-2014**

Oleh: Dewi Lestari

ABSTRAK

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh setiap Negara. Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh inflasi, upah minimum, PDRB, dan nilai tukar terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2003-2014. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kausalitas, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah 33 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika inflasi nilainya naik, maka akan menaikkan jumlah tingkat pengangguran. Upah minimum regional memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika upah minimum regional nilainya naik, maka tidak akan menaikkan jumlah tingkat pengangguran secara signifikan. PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika PDRB nilainya naik, maka akan menurunkan jumlah tingkat pengangguran. Nilai tukar memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika nilai tukar nilainya naik, maka akan menurunkan jumlah tingkat pengangguran.

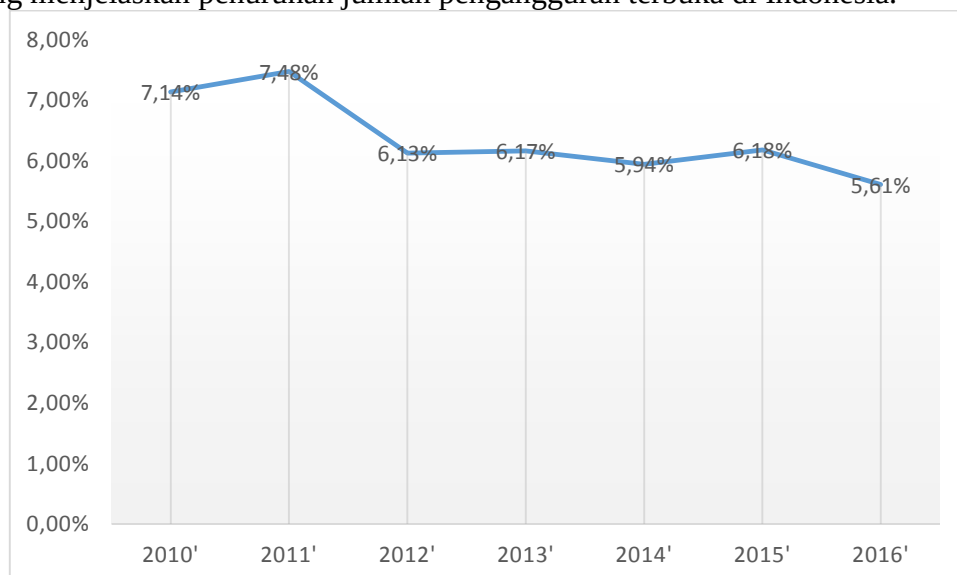
Kata Kunci: Pengangguran, Inflasi, Upah minimum, PDRB, Nilai tukar

PENDAHULUAN

Pengangguran merupakan salah satu permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh setiap Negara. Menurut Simanjutak (2001), pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari dua hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Guna mengukur tingkat pengangguran pada suatu wilayah bisa didapat dari persentase membagi jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja dan dinyatakan dalam persen. Pengangguran merupakan masalah yang sangat kompleks karena mempengaruhi dan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang tidak selalu mudah untuk dipahami. Ketika pengangguran tersebut tidak segera diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial, dan berpotensi mengakibatkan kemiskinan (Badan Pusat Statistik, 2007).

Ketiadaan pendapatan menyebabkan penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan. Pengangguran yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan kekacauan politik keamanan dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Akibat jangka panjang adalah menurunnya GNP dan pendapatan per kapita suatu negara. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, dikenal istilah "pengangguran terselubung" di mana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga kerja sedikit, dilakukan oleh banyak orang.

Sebagai Negara berkembang, permasalahan pengangguran juga dihadapi oleh Indonesia. Berdasarkan data BPS, pada periode 2010 sampai 2016 terdapat penurunan jumlah pengangguran terbuka yang ada di Indonesia. Berikut grafik yang menjelaskan penurunan jumlah pengangguran terbuka di Indonesia.



Gambar 1 Grafik Jumlah Pengangguran Indonesia

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi jumlah pengangguran. Menurut Philips dalam Mankiw (2007) inflasi mempunyai hubungan yang negatif

terhadap pengangguran. Phillips dalam Mankiw (2007) menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan yaitu jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi) maka, pengangguran berkurang.

Selanjutnya, menurut Mankiw (2007), upah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Upah juga merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit tenaga kerja yang berupa jumlah uang yang dibayarkan. Penetapan upah yang dilakukan pemerintah pada suatu negara akan memberikan pengaruh terhadap besarnya pengangguran yang ada. Semakin besar upah yang ditetapkan oleh pemerintah maka hal tersebut akan berakibat pada penurunan jumlah orang yang bekerja pada negara tersebut (Kaufman dan Hotchkiss, 1999).

Menurut Gilarso (2003), upah atau balas karya tenaga kerja ada dua segi yang penting, untuk pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang mesti ditekan serendah mungkin. Di sisi lain, untuk pihak pekerja, upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya, dan dengan demikian juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya upah atau gaji langsung menyangkut pribadi manusia, harga diri, dan statusnya dalam masyarakat, serta merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat sebagai keseluruhan.

Selain inflasi dan upah, tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan PDRB juga diasumsikan memiliki dampak terhadap tingkat pengangguran di Indoensia. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. Ketika terjadi pertumbuha ekonomi, kegiatan industri akan membutuhkan banyak tenaga kerja dan hal ini tentu akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Selanjutnya, faktor lain juga juga diasumsikan memiliki pengaruh terhadap pengangguran yaitu nilai tukar. Ketika nilai rupiah terus melemah maka akan membuat harga bahan baku ataupun barang impor menjadi semakin mahal. Sebagai dampaknya, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah produksinya. Pengurangan nilai produksi dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja dengan para karyawannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh inflasi dan upah minimum regional terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode 2006-2015

LANDASAN TEORI

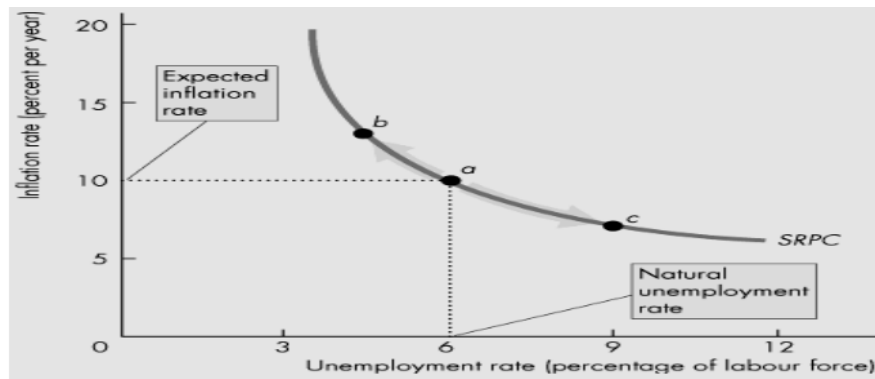
1. Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2007). Tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai penganggur. Pengangguran menunjukkan sumber daya yang terbuang. Para pengangguran memiliki potensi untuk memberikan kontribusi pada pendapatan nasional, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Pencarian pekerjaan yang cocok dengan keahlian mereka adalah menggembirakan jika pencarian itu berakhir, dan orang-orang yang menunggu pekerjaan di perusahaan yang membayar upah di atas keseimbangan merasa senang ketika lowongan terbuka (Sukirno, 2000).

Angkatan kerja meliputi populasi dewasa yang sedang bekerja atau sedang mencari kerja (McEachern, 2000). Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja merupakan sebagian masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong siap bekerja dan mencari pekerjaan termasuk dalam golongan menganggur. Golongan penduduk yang tergolong sebagai angkatan kerja adalah penduduk yang berumur di antara 15 sampai 64 tahun (Sukirno, 2000). Bukan angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari pekerjaan, atau bisa dikatakan sebagai bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat atau tidak berusaha terlibat dalam kegiatan produksi (Sukirno, 2000). Kelompok bukan angkatan kerja ini terdiri atas golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain yang menerima pendapatan.

2. Pengaruh Inflasi terhadap Pengangguran

Hubungan terbalik (*tradeoff*) antara pengangguran dan inflasi disebut kurva phillips. Semakin tinggi tingkat pengangguran maka semakin rendah tingkat inflasi upah. Dalam hal ini pengangguran sebagai output dan menerjemahkan inflasi sebagai perubahan harga. Kondisi dimana secara simultan pengangguran tinggi dan diikuti inflasi yang tinggi disebut sebagai stagflasi (Dornbusch, Fisher, Startz, 2008). Berikut gambar dari kurva phillips:



Gambar II. 1 Kurva Phillips

A.W. Phillips menggambarkan bagaimana sebaran hubungan antara inflasi dengan tingkat pengangguran didasarkan pada asumsi bahwa inflasi merupakan cerminan dari adanya kenaikan permintaan agregat. Dengan naiknya permintaan agregat, maka sesuai dengan teori permintaan, jika permintaan naik maka harga akan naik. Dengan tingginya harga (inflasi) maka untuk memenuhi permintaan tersebut produsen meningkatkan kapasitas produksinya dengan menambah tenaga kerja (asumsinya tenaga kerja merupakan satu-satunya input yang dapat meningkatkan output). Akibat dari peningkatan permintaan tenaga kerja maka dengan naiknya harga-harga (inflasi), pengangguran berkurang.

3. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengangguran

Tingkat upah memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pengangguran, dikarenakan upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja, agar sampai pada tingkat pendapatan “*living wage*” yang berarti bahwa orang bekerja akan mendapat pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam eksploitasi tenaga kerja terutama *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional.

Hubungan antara tingkat upah dengan pengangguran juga dapat dijelaskan melalui kurva Phillips. Kurva Phillips menjelaskan adanya hubungan terbalik (*tradeoff*) antara inflasi dan pengangguran. Ketika terjadi kenaikan inflasi, harga-harga yang naik akan mendorong naiknya tingkat upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini akan mendorong produsen melakukan efisiensi terhadap industrinya, seperti merasionalisasikan tenaga kerja dan restrukturisasi atau melakukan perampangan organisasi perusahaannya yang berakibatkan semakin bertambahnya jumlah pengangguran. Penawaran tenaga kerja kian bertambah sedangkan permintaan terhadap tenaga kerja kian berkurang. Tenaga kerja yang menganggur atau terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terpaksa harus mau menerima upah atau gaji yang rendah yang tidak jarang pula lebih rendah nilainya daripada harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Di pasar tenaga kerja, penurunan tingkat upah akan menyebabkan meningkatkan pengangguran karena adanya kelebihan penawaran tenaga kerja.

Sebaliknya, tingkat upah akan naik jika terjadi kelebihan permintaan tenaga kerja atau jumlah pengangguran meningkat dan jumlah pencarian kerja bertambah, maka tingkat upah akan turun. Demikian pula tenaga kerja akan meningkat.

4. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pengangguran

Menurut Todaro (2000) pembangunan ekonomi mengisyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya. Sehingga secara teori setiap adanya peningkatan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan dapat menyerap tenaga kerja.

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diukur melalui peningkatan atau penurunan PDB atau di Indonesia sendiri dapat diukur dengan PDB yang dihasilkan suatu daerah atau disebut dengan PDRB, karena salah satu indikator yang berhubungan dengan jumlah angka tenaga kerja adalah PDRB. Beberapa negara memiliki hubungan positif antara PDRB dengan angka pengangguran namun ada juga yang berhubungan negatif. Hubungan yang positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak diiringi oleh peningkatan kapasitas produksi sehingga tidak adanya penyerapan tenaga kerja. Sedangkan hubungan negatif disebabkan karena pertumbuhan ekonomi yang meningkat namun diiringi peningkatan peluang kerja karena orientasi yang lebih pada padat karya sehingga terjadi penyerapan tenaga kerja yang akan membantu mengurangi angka pengangguran.

Hubungan PDRB dengan tingkat pengangguran dapat dijelaskan melalui hukum Okun. Output dapat diilustrasikan sebagai salah satu indikasi untuk melihat adanya kesempatan kerja. Suatu periode dimana output lebih tinggi dari titik potensialnya, maka akan tersedia kesempatan kerja yang lebih banyak. Pada kondisi ini, pengangguran akan dapat ditekan atau bahkan akan menurun. Arthur Okun memberikan definisinya melalui Hukum Okun yang mengatakan bahwa untuk setiap 2 persen penurunan pendapatan nasional secara relatif terhadap GNP potensial, tingkat pengangguran akan naik satu persen. Hukum Okun merupakan pengingat bahwa faktor-faktor yang menentukan siklus bisnis pada jangka pendek sangat berbeda dengan faktor-faktor yang membentuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

5. Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Pengangguran

Nilai tukar (*exchange rate*) valuta asing dapat dinilai sebagai harga salah satu mata uang yang dinyatakan menurut mata uang lainnya (Eiteman, Stonehill, dan Moffet, 2003). Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai tukar (*exchange rate*) adalah nilai tukar yang menunjukkan jumlah unit mata uang tertentu yang dapat ditukar dengan satu mata uang lain. Dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan mengakibatkan meningkatnya biaya impor bahan-bahan baku yang akan digunakan untuk produksi dan juga meningkatkan suku bunga. Walaupun menurunnya nilai

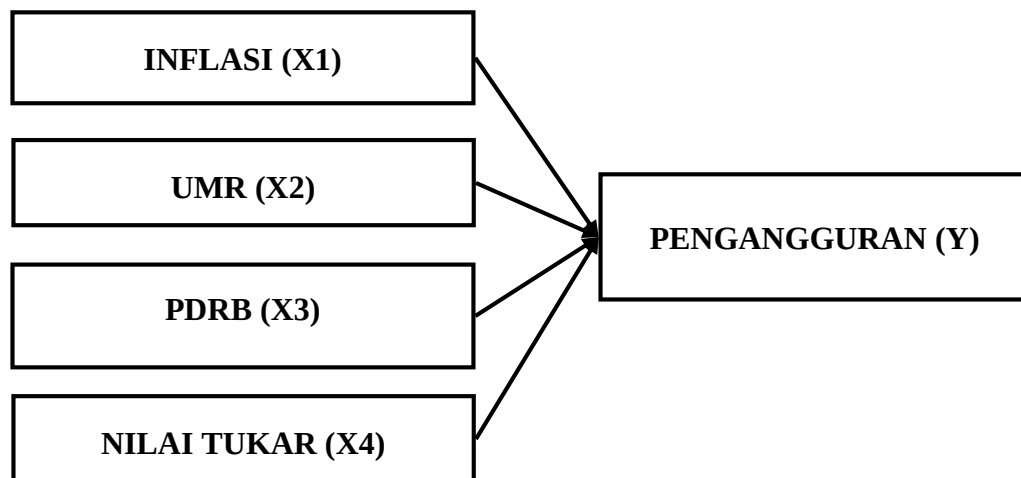
tukar juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan ekspor (Nugroho, 2008).

Pendapat lain menambahkan bahwa nilai tukar satu mata uang mempengaruhi perekonomian apabila nilai tukar mata uang tersebut terapresiasi atau terdepresiasi. Kenaikan harga valuta asing disebut depresiasi atas mata uang dalam negeri. Mata uang asing menjadi lebih mahal, ini berarti nilai relatif mata uang dalam negeri merosot. Turunnya harga valuta asing disebut apresiasi mata uang dalam negeri. Mata uang asing menjadi lebih murah, ini berarti nilai relatif mata uang dalam negeri meningkat. Fluktuasi atas perubahan nilai tukar merupakan pusat perhatian pasar mata uang luar negeri (*foreign exchange market*) (Manurung dan Manurung, 2009).

Teori mengenai nilai tukar dapat dijelaskan melalui model Mundell-Fleming yang merupakan versi perekonomian terbuka dari model IS-LM. Kedua model tersebut menekankan interaksi antara pasar barang dan pasar uang, serta mengasumsikan bahwa tingkat harga adalah tetap dan menunjukkan apa yang menyebabkan fluktuasi jangka pendek dalam perekonomian. Model Mundell-Fleming merupakan model yang memadukan antara keseimbangan internal dan eksternal. Keseimbangan internal adalah keseimbangan antara pasar barang (IS), pasar uang (LM). Sementara itu keseimbangan eksternal ditunjukkan oleh keseimbangan neraca pembayaran.

Berdasarkan landasan teori, dapat dipahami bahwa nilai tukar (*exchange rate*) adalah harga satu mata uang yang diekspresikan terhadap mata uang lainnya. Melemahnya rupiah terhadap mata uang asing mengakibatkan harga bahan baku ataupun barang impor menjadi semakin mahal. Sebagai dampaknya, banyak perusahaan yang mengurangi jumlah produksinya. Pengurangan nilai produksi dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja dengan para karyawannya.

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka dan landasan teori, variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah inflasi dan upah minimum regional. Variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah tingkat pengangguran. Untuk memperoleh gambaran yang lebih sederhana dapat dijelaskan melalui skema berikut:



Gambar 2 Kerangka Pikir

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder secara keseluruhan diambil dari sumber resmi dalam bentuk tahunan pada periode 2003 sampai 2014. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh provinsi di Indonesia dengan kriteria yaitu provinsi yang menerbitkan laporan mengenai tingkat pengangguran, inflasi, upah minimum regional, PDRB dan nilai tukar pada periode 2003-2014. Berdasarkan hal tersebut, jumlah provinsi yang digunakan pada penelitian ini adalah 33 provinsi. Data tingkat pengangguran, inflasi, upah minimum regional, dan PDRB diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) sedangkan data nilai tukar akan diambil dari situs id.investing.com. Teknik analisis yang digunakan untuk menjawab seluruh tujuan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi data panel. Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section* (Widiarjono, 2007). Model hubungan kinerja dengan variabel-variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut:

$$\hat{Y}_{it} = b_0 + b_1 \cdot INF_{it} + b_2 \cdot UMR_{it} + b_3 \cdot PDRB_{it} + b_4 \cdot NT_{it} + e_{it}$$

Keterangan:

Y = Pengangguran
 b_0 = Konstanta
 INF = Inflasi
 UMR = Upah Minimum Regional
 PDRB = PDRB
 NT = Nilai Tukar
 $b_{1,2,3,4}$ = Koefisien Regresi
 e = Error
 i = Jumlah Provinsi
 t = Periode Waktu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Estimasi Fixed Effect

Variable	Coeff	Std, Er	t-Stat	Prob,	Variable	Coeff	Std, Er	t-Stat	Prob,
C	74,578	7,731	9,646	0,000	NTB	-2,375			
INF?	0,134	0,025	5,444	0,000	NTB	-6,981			
LN_UMR?	0,238	0,817	0,291	0,771	Kalbar	-2,122			
LN_PDRB?	-3,378	0,593	-5,693	0,000	Kalteng	-4,836			
LN_NTKAR?	-3,718	1,038	-3,582	0,000	Kalsel	-1,929			
Aceh	3,027				Kaltim	8,333			
Sumut	5,973				Sulut	0,899			
Sumbar	2,392				Sulteng	-3,548			
Riau	6,385				Sulsel	4,067			
Jambi	-2,933				Sultra	-4,368			
Sumsel	3,058				Gorontalo	-7,841			
Bengkulu	-6,813				Sulbar	-9,473			
Lampung	0,411				Maluku	-3,500			
Kep Bangka	-5,035				Malut	-9,756			
Kep Riau	0,618				Papbar	-3,463			
DKI	12,719				Papua	-2,536			
Jabar	12,340				R-sq				0,883
Jateng	5,977				Ad R-sq				0,868
DIY	-3,427				F-statistic				60,107
Jatim	6,690				Prob F				0,000
Banten	9,755								
Bali	-4,172								

Sumber: Olahdata (2017)

1. Pengaruh Inflasi terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian mengenai pengaruh inflasi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode observasi 2003-2014 menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Ini berarti apabila terjadi kenaikan inflasi, maka akan meningkatkan tingkat pengangguran di Indonesia, dan sebaliknya apabila terjadi penurunan tingkat inflasi maka juga akan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia.

Hasil ini bertolak belakang dengan hipotesis penelitian yang mengatakan bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pengangguran. Perbedaan hasil penelitian dengan hipotesis dikarenakan inflasi yang terjadi tidak hanya menyebabkan peningkatan harga barang-barang dalam jangka waktu yang lama, namun juga menyebabkan adanya penurunan kemampuan beli masyarakat. Hal ini jika terus berlanjut, maka akan mengakibatkan pada produsen mengalami kerugian. Guna mengatasi kerugian tersebut, para produsen terpaksa mengurangi jumlah tenaga kerja yang dimiliki, sehingga pengangguran akan meningkat. Kondisi ketika terjadi kenaikan inflasi bersamaan dengan adanya peningkatan jumlah pengangguran disebut dengan stagflasi.

Di bidang moneter, laju inflasi yang tinggi dan tidak terkendali dapat mengganggu upaya perbankan dalam mengarahkan dana masyarakat. Hal ini disebabkan, karena tingkat inflasi yang tinggi menyebabkan tingkat suku bunga riil menjadi menurun. Fakta demikian akan mengurangi hasrat masyarakat untuk menabung sehingga pertumbuhan dana perbankan yang bersumber dari masyarakat akan menurun (Pohan, 2008). Karakteristiknya yang mencerminkan kenaikan harga yang menyeluruh menjadikannya termasuk ke dalam klasifikasi variabel makroekonomi dan dijadikan indikator stabilitas harga karena hubungannya yang selalu dikaitkan dengan moneter agregat (Zeman dan Jurca, 2008).

Secara umum, pendapat ahli ekonomi menyimpulkan bahwa inflasi yang menyebabkan turunnya daya beli dari nilai uang terhadap barang-barang dan jasa. Besar kecilnya ditentukan oleh elastisitas permintaan dan penawaran akan barang dan jasa. Faktor lain yang juga turut menentukan fluktuasi tingkat harga umum diantaranya adalah kebijakan pemerintah mengenai tingkat harga, yaitu dengan mengadakan kontrol harga, pemberian subsidi kepada konsumen dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Utomo (2013), Qomariah (2013), Panjawa dan Soebagiyo (2014), dan Murniasih, Dunia, Meitriana (2014) yang menemukan bahwa inflasi tidak memiliki dampak signifikan terhadap pengangguran.

2. Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian mengenai pengaruh tingkat upah minimum terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode observasi 2003-2014 menunjukkan pengaruh yang positif dan namun tidak signifikan. Hal ini berarti apabila terdapat kenaikan tingkat upah minimum maka akan meningkatkan tingkat pengangguran namun dampak yang diberikan tidak signifikan.

Sebaliknya apabila terjadi penurunan tingkat upah, maka akan menurunkan tingkat pengangguran namun tidak signifikan.

Tidak signifikannya pengaruh yang diberikan oleh tingkat upah minimum terhadap pengangguran diakibatkan oleh mayoritas pekerja di Indonesia bekerja pada sektor informal, sehingga adanya kebijakan kenaikan tingkat upah minimum yang ditetapkan pemerintah tidak serta merta mendorong kenaikan upah secara langsung pada sektor tersebut. Hal ini mengakibatkan perusahaan yang bergerak di sektor informal tersebut tidak perlu melakukan PHK terhadap pekerjaannya dikarenakan perusahaan sektor informal tidak mengalami peningkatan biaya produksi.

Upah minimum adalah sebuah kontroversi, bagi yang mendukung kebijakan tersebut mengemukakan bahwa upah minimum diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pekerja agar sampai pada tingkat pendapatan "*living wage*", yang berarti bahwa orang yang bekerja akan mendapatkan pendapatan yang layak untuk hidupnya. Upah minimum dapat mencegah pekerja dalam pasar monopoli dari eksploitasi tenaga kerja terutama yang *low skilled*. Upah minimum dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi konsekuensi pengangguran seperti yang diperkirakan teori ekonomi konvensional (Kusnaini dalam Indriastuti, 2013).

Hubungan antara upah dan pengangguran dikemukakan oleh (Kaufman dan Hotchkiss dalam Dewi 2010). Problem yang langsung menyentuh kaum buruh atau pekerja adalah rendahnya atau tidak sesuai pendapatan (upah) yang diperoleh dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta tanggungannya. Faktor ini yakni kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara upah yang diterima kecil. Upah itu merupakan unsur terpenting yang berpengaruh terhadap kehidupan pekerja karena upah menjadi sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya baik berupa sandang, pangan, perumahan maupun kebutuhan lain. Seseorang akan menolak mendapatkan upah tersebut sehingga menyebabkan pengangguran. Jika upah yang ditetapkan pada suatu daerah terlalu rendah maka akan berakibat pada tingginya tingkat pengangguran yang terjadi pada daerah tersebut. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mansur, Engka, dan Temengkeng (2014) dan Alif (2014) yang menemukan bahwa tingkat upah minimum berpengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran.

3. Pengaruh PDRB terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian mengenai pengaruh PDRB terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode observasi 2003-2014 menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Hal ini berarti apabila terdapat peningkatan PDRB maka akan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia dan sebaliknya apabila terjadi penurunan PDRB maka akan meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Dampak negatif tingkat upah minimum terhadap pengangguran sesuai dengan hipotesis penelitian yang menjelaskan bahwa ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, kegiatan industri akan membutuhkan banyak tenaga kerja dan hal ini tentu akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Menurut Sukirno (2004), PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah atau propinsi. Pengertian nilai tambah bruto adalah nilai produksi (output) dikurangi dengan biaya antara (*intermediate cost*). Komponen-komponen nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan kemudian menjumlahkannya akan menghasilkan produk domestik regional bruto (PDRB).

Menurut BPS (2007), PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah dalam suatu periode tertentu. Hasil perhitungan PDRB biasa dikenal sebagai PDRB menurut lapangan usaha dan PDRB menurut penggunaan. PDRB menurut lapangan usaha merupakan total nilai tambah (*value added*) dari semua kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan pada periode waktu tertentu, sedangkan PDRB menurut penggunaan merupakan jumlah nilai barang dan jasa yang digunakan untuk konsumsi akhir.

4. Pengaruh Nilai Tukar terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil penelitian mengenai pengaruh nilai tukar terhadap tingkat pengangguran di Indonesia pada periode observasi 2003-2014 menunjukkan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Hal ini berarti apabila terdapat peningkatan nilai tukar terhadap rupiah, maka akan menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia, dan sebaliknya apabila terdapat penurunan angka nilai tukar rupiah maka akan meningkatkan jumlah pengangguran di Indonesia. Dampak negatif nilai tukar terhadap pengangguran diasumsikan terjadi karena pada saat nilai tukar rupiah semakin melemah, maka akan meningkatkan harga akan produk-produk dari luar negeri. Hal ini menyebabkan masyarakat mencoba mencari alternatif produk yang berasal dari produsen dalam negeri, sehingga permintaan produk dalam negeri akan meningkat. Guna memenuhi permintaan tersebut, pihak produsen akan menambah jumlah tenaga kerja.

Dengan menurunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing akan mengakibatkan meningkatnya biaya impor bahan-bahan baku yang akan digunakan untuk produksi dan juga meningkatkan suku bunga. Walaupun menurunnya nilai tukar juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan ekspor (Nugroho, 2008). Pendapat lain menambahkan bahwa nilai tukar satu mata uang mempengaruhi perekonomian apabila nilai tukar mata uang tersebut terapresiasi atau terdepresiasi. Kenaikan harga valuta asing disebut depresiasi atas mata uang dalam negeri. Mata uang asing menjadi lebih mahal, ini berarti nilai relatif mata uang dalam negeri merosot. Turunnya harga valuta asing disebut apresiasi mata uang dalam negeri. Mata uang asing menjadi lebih murah, ini berarti nilai relatif mata uang dalam negeri meningkat. Fluktuasi atas perubahan nilai tukar merupakan pusat perhatian pasar mata uang luar negeri (*foreign exchange market*) (Manurung dan Manurung, 2009).

Sistem nilai tukar tetap (*fixed exchange rate*) dimana lembaga otoritas moneter menetapkan tingkat nilai tukar mata uang domestik terhadap mata

uang negara lain pada tingkat tertentu, tanpa memperhatikan penawaran ataupun permintaan terhadap valuta asing yang terjadi. Bila terjadi kekurangan atau kelebihan penawaran atau permintaan lebih tinggi dari yang ditetapkan pemerintah, maka dalam hal ini akan mengambil tindakan untuk membawa tingkat nilai tukar ke arah yang telah ditetapkan. Tindakan yang diambil oleh otoritas moneter bisa berupa pembelian ataupun penjualan valuta asing, bila tindakan ini tidak mampu mengatasinya, maka akan dilakukan penjabatan valuta asing (Halwani, 2005).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

- a. Inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika inflasi nilainya naik, maka akan menaikkan jumlah tingkat pengangguran.
- b. Upah minimum regional memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika upah minimum regional nilainya naik, maka tidak akan menaikkan jumlah tingkat pengangguran secara signifikan.
- c. PDRB memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika PDRB nilainya naik, maka akan menurunkan jumlah tingkat pengangguran.
- d. Nilai tukar memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Dengan kata lain, jika nilai tukar nilainya naik, maka akan menurunkan jumlah tingkat pengangguran.

2. Implikasi Penelitian dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Berdasarkan kesimpulan, maka implikasi hasil penelitian yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Kepada pemerintah hendaknya dapat mempertimbangkan kebijakan untuk melakukan peningkatan tingkat upah minimum di setiap regional. Hal ini dikarenakan tingkat upah minimum regional memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.
- b. Bagi peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel mikro dan makro lainnya dalam menjelaskan dampaknya terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Agustina Mustika Candra. (2010). Analisis Tingkat Pengangguran dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi di Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang: Universitas di Ponegoro.
- Dornbusch, Rudiger, Stanley Fischer, dan Richard Startz. (2004). *Makroekonomi*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.

- Halwani, Hendra. (2005). *Ekonomi Internasional & Globalisasi Ekonomi* Edisi Kedua. Ghalia Indonesia: Bogor.
- Indriastuti, Ine. (2013). Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja serta Upah Teori serta Beberapa Potretnya Di Indonesia. www.slidershare.net/inebunga/permintaan-dan-penawaran-tenaga-kerja-serta-upah-teori-serta-beberapa-potretnya-d-indonesia.
- Mankiw, N. G. (2007). *Teori Makro Ekonomi*. Terjemahan. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mansur, Nirmala; Daisy Engka; dan Steeva Tumangkeng. (2014). Analisis Upah Terhadap Pengangguran Di Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*. Vol 14 No 2 .
- Manurung Jonni J., dan Adler H. Manurung. (2009). *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*. Cetakan Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- McEachern, W A. (2000). *Ekonomi Makro, pendekatan kontemporer*”, terjemahan: Sigit Triandaru. Jakarta: Salemba Empat.
- Murniasih, Dunia, Meitriana. (2014). Pengaruh Nilai PDRB, Tingkat Upah dan Tingkat Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka Provinsi Bali Tahun 2003-2012. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi*. Vol 4, No 1.
- Nugroho, Heru. (2008). Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs dan Jumlah Uang Beredar terhadap Indeks LQ45 (Studi Kasus pada BEI Periode 2002-2007). *Thesis Program Studi Magister Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Panjawa, J L., D Soebagiyo. (2014). Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*. Vol 15, No 1.
- Pohan, A. (2008). *Kerangka Kebijakan Moneter dan Implikasinya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Qomariyah, I. (2013). Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*. Vol 1, No 3.
- Sukirno, S. (2000). *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2004). *Makro Ekonomi Modern, Perkembangan Pemikiran dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M.P. (2000). *Economic Development*, Seventh Edition, New York, Addition Wesley Longman, Inc.
- Utomo, F.W. (2013). Pengaruh Inflasi dan Upah Terhadap Pengangguran Di Indonesia Periode Tahun 1980-2010. *Jurnal Ilmiah*. Universitas Brawijaya.
- Widarjono, Agus. (2007). *Ekonometrika Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII.
- Zeman, J dan P Jurca. (2008). Macro Stress Testing of the Slovak Banking Sector. *Working Paper 1 National Bank of Slovakia*. ISSN: 1337-5830.